

Research Article

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia

Khoirunnisaa Sholihah Luthfi Alya'

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 22204011054@student.uin-suka.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : October 25, 2023

Revised : November 22, 2023

Accepted : December 7, 2023

Available online : December 25, 2023

How to Cite: Khoirunnisaa Sholihah Luthfi Alya'. 2023. "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9 (4):1678-89. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i4.666.

Abstract: This writing aims to determine the development of the Islamic religious education curriculum using the library research method, namely by examining various sources of data from various books or journals that are still related to the theme of discussion in this writing. The results of this paper show that the Islamic religious education curriculum in Indonesia goes through four phases, namely pre-independence, the old order period, the new order period and the current reformation period. The details are as follows: the pre-independence period was still influenced by colonialism as a whole, then the Old Order period was divided into 3, namely the 1947 curriculum, 1984 curriculum and 1994 curriculum, then the New Order period was divided into 4, namely the 1968 curriculum, 1975 curriculum, 1984 curriculum and The 1994 curriculum and the last reformation period are currently divided into 4, namely the 2004 curriculum (KBK), the 2006 curriculum (KTSP), the 2013 curriculum and the independent curriculum.

Keyword: Curriculum, Islamic Religious Education, Indonesia.

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber data dari berbagai buku atau jurnal yang masih berkaitan dengan tema pembahasan dalam penulisan ini. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia melalui empat fase yaitu pra kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi saat ini. Adapun dengan rincian sebagai berikut : masa pra kemerdekaan masih dipengaruhi oleh kolonialisme secara keseluruhan, kemudian masa orde lama terbagi menjadi 3 yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1984 dan kurikulum 1994, selanjutnya masa orde baru terbagi menjadi 4 yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 dan kurikulum 1994 dan yang terakhir masa reformasi

hingga saat ini terbagi menjadi 4 yaitu kurikulum 2004 (KBK), kurikulum 2006 (KTSP), kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka.

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Indonesia.

PENDAHULUAN

Kurikulum menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Kurikulum telah ada sejak zaman penjajah Belanda dan sudah resmi diterapkan di lembaga pendidikan pada masa tersebut (Fitri Wahyuni, 2015). Kurikulum itu sendiri mempunyai pengertian yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pendidikan suatu negara. Banyak yang beranggapan bahwa bentuk kehidupan yang digunakan oleh bangsa juga dipengaruhi oleh kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh negara tersebut (Lismina, 2019).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia berkembang sangat pesat tidak dipungkiri hal tersebut juga memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan. Utamanya terkait dengan kurikulum. Hasil pencapaian dalam mata pelajaran pendidikan agama islam menjadi salah satu bukti dari keberhasilan kompetensi beragama islam. Akan tetapi, dalam kenyatannya terdapat indikator bahwa aspek kognitif tidak sebanding dengan pengamalan nilai agama islam dalam sehari-harinya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan yang diperoleh peserta dengan pengalamannya belum berjalan secara efektif (Ismail dan Abdul Mukti, 2000). Oleh karena itu pemerintah Indonesia dengan latar belakang adanya masalah terhadap pendidikan yang terjadi inilah yang kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan khususnya dalam bidang kurikulum. Kurikulum sering mengalami perubahan dan berusaha untuk menyempurnakan yang ada sebelumnya. Tentunya tujuan negara juga dapat berubah secara menyeluruh seperti negara Indonesia yang awalnya dijajah oleh bangsa Eropa kemudian menjadi negara yang merdeka (S. Nasution, 1996). Di Indonesia yang seiring berjalannya waktu mengalami perubahan berkali-kali menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tentunya bertujuan untuk menyelaraskan antara perkembangan pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Pada dasarnya semua perubahan kurikulum yang dilakukan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik (E. Mulyasa, 2009).

Opini masyarakat banyak yang beranggapan bahkan tertanam dalam diri untuk mempunyai pandangan bahwa “ganti menteri ganti kurikulum” seperti sudah mengakar dalam diri, padahal kenyatannya perubahan kurikulum ini sebagai dampak adanya perubahan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Ternyata dengan semua perubahan yang terjadi selalu dipandang positif, banyak juga yang beranggapan sebaliknya, sehingga perlu dilakukan perbaikan secara berkala dalam setiap masa. Seperti yang kita ketahui bahwa hingga saat ini negara kita masih mengacu kepada desain kurikulum yang dikonsepsikan oleh barat, karena beranggapan bahwa negara barat lebih cerdas dan mampu berkembang pesat untuk menciptakan inovasi dan kreatifitas yang baru di bidang pendidikan. Sementara di Indonesia masih terfokus kepada proses untuk menemukan konsep kurikulum yang paling tepat untuk

digunakan. Perubahan yang sering terjadi ternyata tidak menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan di awal penyusunan kurikulum tersebut, bahkan tidak jarang yang menyatakan gagal (Muh. Asri, 2017). Tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia baik untuk diketahui melalui problematika yang terjadi serta penerapan yang dilakukan saat itu dalam dunia pendidikan, sehingga dapat diketahui bagaimana pelajaran yang kita ambil dari perkembangan tersebut khususnya yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui studi pustaka. Mengumpulkan berbagai sumber data seperti buku atau jurnal yang masih berkaitan dengan tema pembahasan dalam jurnal ini sebagai teknik pengumpulan datanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pra Kemerdekaan di Indonesia

Pada masa ini pendidikan agama islam sangat tidak diperhatikan dikarenakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan masih dipengaruhi oleh kolonialisme. Sehingga hasil dari pendidikan pra kemerdekaan hanya untuk mengabdikan diri kepada penjajah (M. Ali Hasan dan Mukti Ali, 2003). Pada dasarnya tidak terpikirkan untuk memperhatikan pendidikan tetapi hanya terfokus dalam mencari rempah-rempah saja. Walaupun begitu, bangsa Eropa juga memiliki tujuan lain yaitu penyebaran agama. Abad ke 16 dan 17 bangsa Eropa berlomba untuk mendirikan lembaga pendidikan sebagai wadah untuk memperluas penyebaran agama Kristen, pendidikan hanya terbatas untuk bangsa mereka sendiri dan pribumi yang beragama Kristen.

Pihak penjajah membutuhkan tenaga pegawai untuk membantu dalam bidang membaca dan menulis sebagai sarana mengembangkan usahanya, utamanya sistem tanam paksa maka dibentuk lembaga pendidikan, tetapi dalam kelas ini yang diperbolehkan bergabung hanya kalangan terbatas. Kolonial mempunyai taraf idealisme sendiri dengan maksud mendirikan pendidikan yang kuat yaitu mencetak pekerja yang dapat dipekerjakan juga. Tujuan dari pendidikan di masa ini adalah pendidikan sebagai wadah untuk menanamkan nilai dan aturan masyarakat penjajah yang kemudian dapat diberikan kepada penduduk pribumi dan menjadikan pribumi sebagai budak pemerintahan kolonialisme (M. Ali Hasan dan Mukti Ali, 2003).

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Orde Lama

Seperti yang kita ketahui, bahwa kurikulum pendidikan nasional ini telah mengalami banyak perubahan. Adapun kurikulum pada masa orde lama terbagi menjadi dua, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947)

Awal kemerdekaan muncul kurikulum yang dinamakan dengan kurikulum 1947. Salah satu ciri khas politisi karena mengacu pada pendidikan Belanda, jelasnya bahwa sistem pendidikan kolonial sangat diskriminatif yang dimaksudkan sekolah dibangun dengan memberikan layanan yang berbeda sesuai golongan misalnya

pendidikan bagi anak Belanda, anak timur asing serta anak pribumi (Alhamuddin, 2019).

Dalam pelaksanaan kurikulum 1947 ini tidak mementingkan aspek kognitif tetapi lebih mengedepankan pembentukan karakter cinta tanah air. Struktur program dibagi menjadi dua yaitu menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dengan mata pelajaran terpisah dan jenjang pendidikan memiliki jumlah mata pelajaran yang berbeda (Dicky Wirianto, 2014). Secara keseluruhan dalam pelaksanaannya masih sederhana terbatas hanya sebagai rencana pembelajaran di kelas.

2. Kurikulum 1952 (Rentjana Terurai 1952)

Pada tahun 1952 kemudian diadakan perbaikan kurikulum yang dinamakan dengan "Rentjana Pelajaran Terurai 1952". Tujuan perbaikan yang utama di masa ini yaitu bagaimana sistem kehidupan yang baik kemudian dihubungkan dengan karakter diri. Kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi salah satu unsur yang menonjol dalam kurikulum 1952, dengan rincian lima kelompok bidang studi atau terkenal dengan istilah pancawardhana yaitu moral, kecerdasan, emosionalistik, keterampilan dan jasmani (Alhamuddin, 2019).

3. Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964)

Kurikulum Indonesia mengalami pengembangan Kembali pada tahun 1964 dengan mengkonsepkan pembelajaran aktif. Berbeda dengan tahun sebelumnya di rentjana pendidikan 1964 ini setiap sekolah diwajibkan untuk mengarahkan siswa agar dapat memecahkan permasalahan sendiri. Sistem belajar yang diterapkan dalam kurikulum 1964 ialah sebuah metode yang dikenal dengan gotong royong terpimpin dan terdapat satu hari kebebasan bagi peserta didik untuk berlatih sesuai kegiatan yang digemarinya. Pemerintah menetapkan setiap hari sabtu dalam seminggu sekali. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan seperti kebudayaan, olahraga, kesenian dengan rencana agar peserta didik mampu untuk menjadi generasi Indonesia pancasialis dengan sosial yang tinggi (Alhamuddin, 2019).

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Orde Baru

1. Kurikulum 1968

Sifat politis sangat melekat dalam kurikulum 1968 sebagai hasil dari peninggalan pemerintahan orde lama. Menurut sudut pandang tujuannya, yang ditekankan dalam kurikulum 1968 ialah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dalam jasmani dan rohani, menyeimbangkan antara kecerdasan dan keterampilan secara bersamaan dan meningkatkan keyakinan menganut agama yang diyakini. Disini terdapat perubahan pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, dengan jumlah mata pelajaran sembilan dan identic sifat pembelajarannya teoritis (Alhamuddin, 2019).

Kelahiran kurikulum 1968 dikarenakan sebab adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut oleh pemerintahan masa orde baru. Ciri khasnya dengan *correlated subject curriculum* yang berarti materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki kolerasi dengan jenjang pendidikan berikutnya. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung oleh ilmu pendidikan dan psikologi tahun 1960-an.

2. Kurikulum 1975

Latar belakang dari kelahiran kurikulum 1975 ialah pembangunan nasional.

Kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat dan tugas sekolah hanya menjalankan. Tujuan pendidikan harus efektif dan efisien. Pendidik dituntut untuk membuat rincian berupa tulisan tentang apa yang akan dicapai dalam setiap pembelajaran sehingga menimbulkan kritik dari beberapa pihak yang ada di lapangan (Muhammad Nurhalim, 2011).

Prinsip dalam pelaksanaannya memuat indikator sebagai berikut (Alhamuddin, 2019) bahwa pendidikan harus berorientasi pada tujuan, menggunakan pendekatan integratif, tenaga dan waktu harus efisien dan efektif, menganut pendekatan sistem instruksional (PSSI) yaitu perubahan tingkah laku peserta didik menjadi tujuan utama dan stimulus serta respon yang terjadi dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku, karena berkaitan dengan tingkah laku maka menggunakan teori belajar behavioristik yang digunakan pembelajaran.

Kemudian di kurikulum 1975 telah memuat pedoman dan ketentuan diantaranya tujuan instruksional yaitu tujuan yang akan dicapai oleh suatu lembaga dalam menerapkan program pendidikan dalam semua jenjang pendidikan, selanjutnya memiliki desain program yang berarti kerangka umum proses pengajaran dan terdapat garis-garis program pengajaran.

Seperti yang kita ketahui terdapat sistem penyajian dengan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional (PSSI), perlu diketahui bahwa pendekatan PSSI ialah konsep pembelajaran yang beranggapan bahwa proses belajar mengajar selalu berorientasi pada capaian tujuan dan juga sistem PSSI saling berkaitan baik dari segi instruksi dan desain tugas yang progresif bagi individu dalam kegiatan belajar (Alhamuddin, 2019).

3. Kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang Disempurnakan)

Penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang menggunakan pendekatan proses. Meskipun menggunakan pendekatan proses namun tujuan juga tetap menjadi bagian penting. Subyek belajarnya ialah peserta didik. Model pembelajarannya dikenal dengan *active learning* karena peserta didik dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, seperti mengamati, berdiskusi hingga membuat kesimpulan berupa laporan. Namun banyak sekolah yang tidak menerapkan dengan baik sehingga peserta didik hanya bergurau saja di kelas (Alhamuddin, 2019).

4. Kurikulum 1994 (*Separate Subject Curriculum*)

Perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dan telah disesuaikan dengan undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Terdapat perubahan dari sistem semester ke sistem catur wulan. Sistem catur wulan adalah pembagian tiga tahap dalam satu tahun sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerima materi pelajaran yang relative banyak. Tujuan pembelajarannya berorientasi pada materi dan keterampilan untuk memecahkan masalah (Iramdan & Manurung Lengsi, 2019). Tujuan dan proses ternyata kurang berhasil disatukan. Disebut dengan *separate subject curriculum* karena memuat materi pelajaran yang terpisah-pisah. Materi dalam muatan lokal dan muatan nasional sangatlah banyak sehingga dapat dikatakan sebagai kurikulum super padat dan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Hari Suderajat mengemukakan bahwa terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Adapun secara umum kelemahan dari kurikulum 1994, diantaranya ialah (Hari Suderajat, 2004):

a. Garis program pembelajaran diorganisasikan ke dalam materi pelajaran keilmuan

sehingga menghilangkan kesatuan bidang studi dan mengakibatkan tidak ada perolehan integral peserta didik.

- b. Pembelajaran kurang dikaitkan dengan aspek sosial, yang pada hakikatnya manusia dikenal sebagai makhluk sosial.
- c. Materi pembelajaran hanya terfokus pada hafalan saja bukan menelaah materi yang diajarkan kemudian menjadikan anak pasif dalam proses pembelajaran.
- d. Materi ajar sangat banyak dan kurang disesuaikan dengan jam pelajaran berlangsung
- e. Tidak memanfaatkan potensi peserta didik yang ada di daerahnya
- f. Beberapa mata pelajaran kurang sinkron antara kehidupan dan lingkungan terutama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Kurang mengembangkan pengolahan fikir dalam strategi belajar yang diterapkan
- h. Tidak terjadi keterkaitan antara pokok bahasan antar mata pelajaran, misal matematika dan fisika, menyebabkan peserta didik sulit memahami salah satunya karena ada pokok bahasan yang belum diberikan
- i. Adanya kelebihan dan kekurangan materi esensial

Akan tetapi dari penjelasan kekurangan materi kurikulum 1994, tentu terdapat juga beberapa faktor kemudahan, antara lain (Hari Suderajat, 2004):

- a. Dokumen kurikulum secara material sudah disiapkan secara keseluruhan sehingga guru akan mudah untuk menyiapkan bahan ajar.
- b. Mata pelajaran berdiri sendiri sehingga guru dapat mempunyai kewenangan untuk merubahnya.
- c. Basis aspek kognitif memudahkan guru dalam melakukan penilaian.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kurikulum 1994 memiliki prinsip *Link and Match* yaitu pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja, sehingga sekolah harus mampu menyediakan tenaga kerja yang terampil dan juga begitupun sebaliknya di bidang industry kerja. Pada akhirnya kurikulum ini banyak ditentang karena dianggap tidak memanusiakan manusia (Imam Machali, 2014).

Kurikulum Era Reformasi

1. Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi)

Kurikulum Berbasis Kompetensi atau dikenal dengan istilah KBK ialah konsep pendekatan strategi kurikulum yang menenkan terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Peserta didik bukan hanya menguasai pengetahuan saja tetapi juga harus memiliki keterampilan serta sikap tanggungjawab (Daeng Pawero, 2018). Konsep dasar pemikiran yang ada dalam KBK ini seperti kompetensi berkaitan dengan potensi peserta didik dalam berbagai konteks, kompetensi mengandung pengalaman belajar untuk menjadi kompeten, kompetensi merupakan hasil belajar yang berisi kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses belajar serta kendala yang dirasakan oleh peserta didik harus diketahui oleh guru sehingga dapat dipantau guna mengatasi kendala yang terjadi.

KBK memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar di setiap mata pelajaran. Menenkan kepada eksplorasi kemampuan potensi peserta didik secara optimal dan mengusahakannya ke dalam penerapan sehari-hari. Komponen utama KBK ialah kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar

mengajar dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Ciri-ciri KBK menurut Depdiknas yang dikutip oleh Zainal Arifin diantaranya memperhatikan apa yang diperoleh peserta didik selama kegiatan belajar mengajar, mempunyai hasil akhir pembelajaran yang bertujuan agar anak memiliki jiwa agamis dan keterampilan, metode pembelajaran beragam, sumber belajar bukan hanya berasal dari guru saja dan penilaian harus berdasarkan dengan proses yang telah dilalui peserta didik selama ini (Zainal Arifin, 2011). Kelebihan KBK yaitu mengembangkan kompetensi pada setiap aspek mata pelajaran, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan kondisi, bentuk laporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek sehingga mudah untuk di evaluasi (Wina Sanjaya, 2018).

2. Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Pencapaian kompetensi ialah wujud orientasi dari KTSP atau hasil dari KBK yang disempurnakan. Unsur standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dalam KBK serta terdapat prinsip yang sama dengan pengelolaan kurikulum yaitu dikenal dengan istilah Kurikulum Berbasis Sekolah (KBS). KTSP memiliki karakteristik yang hampir sama dengan KBK yaitu memberikan keleluasaan kepada guru untuk melakukan perubahan dan penambahan dari standar yang telah dibuat pemerintah seperti tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum serta pengembangan silabus (Herman Zaini, 2015). Latar belakang KTSP antara lain kurikulum yang disusun secara nasional selama ini ternyata mengalami berbagai permasalahan dan kenyataan pendidikan yang dipikirkan oleh pemerintah belum sesuai dengan kondisi potensi daerah, keinginan masyarakat dan seluruh elemen pendidikan untuk mendekatkan penyusunan dan pengembangan kurikulum kepada satuan pendidikan yang merupakan *centre of teaching-learning process* dengan harapan yang disusun dan dikembangkan sesuai kebutuhan kondisi setempat, keinginan untuk memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada untuk berperan aktif dalam penyusunan kurikulum dan sejalan dengan otonomi daerah (Baedhowi, 2007).

Tujuan kebijakan KTSP adalah mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, karakteristik dan potensi kebutuhan daerah. KTSP yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan bisa beragam antar satu sekolah dengan yang lainnya karena disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan karakteristik sekolah. Secara keseluruhan standar isi mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan KTSP, beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, KTSP yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum dan aklender pendidikan untuk penyelenggaraan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah diantaranya kelompok mata pelajaran agama, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran kesenian dan kelompok mata pelajaran olahraga (Baedhowi, 2007).

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam lima kelompok Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merangkai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang kemudian diturunkan menjadi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang menjadi acuan harus berdasarkan

kompetensi inti dan standar kelulusan untuk memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan dan menerapkan proses serta hasil pembelajaran. KTSP dilahirkan dari semangat masing-masing daerah bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga tanggungjawab pemerintah daerah, oleh karena itu dari segi pola pengembangannya KTSP menjadi salah satu kurikulum yang bersifat desentralisasi. Menurut yang dikutip oleh Wina (Wina Sanjaya, 2018) dalam bukunya terdapat beberapa landasan dalam penyusunan kurikulum KTSP diantaranya :

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi.
- d. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- e. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2006 dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.
- f. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Kemudian konsep dasar KTSP dan karakteristik kegiatan pembelajarannya meliputi tiga aspek yang saling berkaitan diantaranya :

- a. Kegiatan pembelajaran.
- b. Penilaian.
- c. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah.

Sedangkan menurut Kunandar yang dikutip oleh Abdullah Idi dalam bukunya bahwa karakteristik pembelajaran dalam KTSP diantaranya (Abdullah Idi, 2013):

- a. KTSP mengarahkan peserta didik sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam ilmu pengetahuan, minat dan bakat yang nanti akan menghasilkan pribadi peserta didik yang terampil.
 - b. Berorientasi pada hasil belajar.
 - c. Menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi.
 - d. Sumber belajar juga beragam bukan hanya menjadikan guru satu-satunya tetapi bisa berasal dari teman sebaya, lingkungan maupun segala hal yang memberikan edukasi.
 - e. Dalam sistem penilaiannya melalui proses yang telah dilalui bukan hanya dilihat melalui hasil akhir saja.
3. Kurikulum 2013

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman milenial ini ternyata menuntut pendidikan di Indonesia untuk melakukan pengembangan kurikulum KTSP karena dianggap masih belum dapat menjawab tantangan zaman, kemudian pemerintah membuat perubahan dengan mengeluarkan keputusan untuk merubah kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Membahas tentang sejarah lahirnya kurikulum KTSP bentuk implementasi undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kemudian substansi kurikulum 2013 ialah peraturan pemerintah no.19 tahun 2005, walalupun demikian tetapi masih mempunyai arah pengembangan yang memuat keberhasilan dalam kompetensi KTSP dan memiliki kemiripan dengan karakteristik yang tertuang dalam kurikulum KBK (Aslam, 2019).

Sehubungan dengan berkembangnya kurikulum selama ini, kurikulum 2013 lebih terfokus kepada pendidikan karakter dengan tujuan menjadikan pribadi yang produktif, kreatif dan mempunyai karakter. Tujuan kurikulum 2013 ialah untuk

meningkatkan pembelajaran dari proses hingga hasil terarah kepada pembentukan karakter sesuai dengan kompetensi lulusan yang harus dimiliki setiap satuan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 sudah menyeimbangkan antara kompetensi dalam bidang kognitif, afektif dan psikomotorik secara bersamaan dan menjadi pertimbangan untuk peserta didik jika ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Karakteristik kurikulum 2013 yang telah disusun oleh pemerintah memiliki ciri khas tersendiri sebagai berikut (Ma'as Shobirin, 2016):

- a. Mengedepankan keseimbangan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik
- b. Penerapan materi yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan sehari-hari peserta didik
- c. Memberikan hak kepada peserta didik untuk lebih leluasa dalam mengembangkan potensi di bidang kognitif, afektif dan psikomotorik
- d. Kompetensi inti termuat lebih luas menjadi kompetensi dasar
- e. Kompetensi dasar yang diambil dari kompetensi inti harus jelas dan berkesinambungan
- f. Kompetensi dasar yang dikembangkan harus saling memperkuat dan memvariasikan mata pelajaran dan semua jenjang pendidikan

Dalam kurikulum 2013 yang masih dipakai hingga saat ini sudah memuat landasan yang jelas diantaranya landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan konseptual. Adapun penjabaran ketiga landasan tersebut sebagai berikut (E. Mulyasa, 2009):

- a. Landasan filosofis: 1) Beragam etika dasar pancasila dalam membangun Pendidikan, dan 2) Berbasis pada nilai fundamental, nilai akademik serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat umum
- b. Landasan Yuridis: 1) PP no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan, dan 2) INPRES no. 1 tahun 2019 tentang penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran secara aktif sebagai pelaksanaan pembangunan nasional agar mampu bersaing dengan berkarakter
- c. Landasan Konseptual: 1) Pendidikan harus diselaraskan dengan kehidupan yang ada di masyarakat, 2) Kurikulum disusun sesuai kompetensi dan karakter, 3) Pembelajaran yang diterapkan melihat kondisi yang ada, 4) Pembelajaran berpusat kepada peserta didik yang aktif, dan 5) Penilaian menyeluruh dari proses hingga hasil secara runtut.

Adapun kekurangan kurikulum 2013 ialah guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental, guru banyak salah faham sehingga kurang memberikan penjelasan, guru kurang kreatif dalam menyusun RPP, materi yang wajib dikuasai oleh peserta didik terlalu banyak dan sekolah kurang mandiri dalam menyikapi kurikulum yang ada. Kemudian dilihat dari keunggulan kurikulum 2013 diantaranya lebih menekankan kepada pendidikan karakter, memungkinkan peserta didik lebih aktif, inovatif dan kreatif, lebih responsive terhadap fenomena sosial yang ada, proses penilaian dilakukan dari semua aspek, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien (Muh. Asri, 2017).

4. Kurikulum Merdeka

Kurikulum 2013 secara keseluruhan sudah hampir sempurna tetapi dengan melihat realita di lapangan perlu diadakan perbaikan secara terus menerus bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk pendidikan di Indonesia. Kurikulum merdeka secara resmi ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek RI pada tahun 2022. Secara sederhana tujuan kurikulum ini adalah tersalurkannya pembelajaran intrakurikuler secara optimal dan meluas ke berbagai daerah. Implementasi kurikulum merdeka ialah kenyamanan, kemandirian serta membentuk peserta didik yang aktif dan berkarakter serta guru memiliki kewenangan untuk leluasa dalam memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan dan minat peserta didik dalam proses belajar (Muhammad Nurhalim, 2011).

Kurikulum merdeka belajar mempunyai lima motto “merdeka belajar, guru penggerak” mempunyai lima rancangan yaitu USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) diserahkan kepada pihak sekolah, sistem UN (Ujian Nasional) dihilangkan kemudian diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, RPP hanya terdiri dari satu lembar dan menggunakan sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) kecuali pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) (Andari, 2022). Kurikulum merdeka mengintegrasikan antara pembentukan karakter baik dan juga generasicakap literasi dengan memanfaatkan penggunaan kemajuan teknologi. Strategi pembelajaran yang diunggulkan dalam kurikulum ini berbasis proyek yang sangat berbeda dengan kurikulum yang ada sebelumnya dikenal dengan istilah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan untuk di madrasah ditambah dengan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5RA). Tema yang ada di P5 ditentukan oleh pemerintah memiliki enam dimensi yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

Kurikulum merdeka memiliki tiga tipe pembelajaran diantaranya pembelajaran intrakurikuler yang dilaksanakan secara bervariasi, pembelajaran berupa proyek profil pelajar Pancasila dan pembelajaran ekstrakurikuler sesuai minat bakat peserta didik di bidang masing-masing (Umami Inayati, 2022). Akan tetapi walaupun berkonsep bebas harus ada hal yang diperhatikan diantara lain :

- a. IKM secara mandiri ialah pilihan bagi satuan pendidikan pada tahun ajaran 2022/2023
- b. Terdapat enam strategi yang berpusat pada penguatan pembelajaran bagi pendidikan dan lembaga pendidikan
- c. IKM diawasi langsung oleh Dinas Pendidikan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota
- d. Satuan pendidikan dalam mengimplementasikan IKM mandiri harus sesuai dengan kesiapan

Kemudian dalam penerapannya terdapat tiga pilihan yaitu (Umami Inayati, 2022):

- a. Kategori Mandiri Belajar yang bermaksud bahwa setiap satuan pendidikan tetap menggunakan kurikulum 2013 dan juga menerapkan bagian tertentu dan prinsip kurikulum merdeka
- b. Kategori Mandiri Berubah yang bermaksud bahwa pada tahun ajaran 2022/2023 satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum merdeka yang berpedoman

kepada perangkat ajar yang telah diberikan oleh Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk semua jenjang.

- c. Kategori Mandiri Berbagi yang bermaksud bahwa lembaga pendidikan dapat menerapkan kurikulum merdeka kemudian mengembangkan sendiri sebagian perangkat ajar

Beberapa peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam memantau proses IKM sejauh ini diantara lain menyusun tim IKM setiap wilayah, mengarahkan seluruh satuan pendidikan untuk memiliki dan aktivasi akun belajar.id kemudian mendownload Platform Merdeka Mengajar (PMM), melakukan pengawasan IKM sehubungan dengan aktivitas guru dan proses belajar mengajar, memastikan semua unsur pendidik dan pengawas untuk menelaah perangkat ajar, dinas pendidikan provinsi dan kabupate/kota juga memberikan fasilitas berupa buku bahan ajar cetak jika diperlukan, memberikan pengarahan kepada guru untuk memanfaatkan PMM dan memberikan dukungan bagi yang akses satuan pendidikannya terbatas (Ummi Inayati, 2022).

Kemudian untuk satuan pendidikan juga harus mempersiapkan IKM, beberapa persiapan dimulai dengan membentuk komunitas belajar, melakukan aktivasi akun belajar, menentukan perangkat ajar yang digunakan, memesan buku ajar cetak, memeperkuat budaya belajar bagi pendidik dan menyiapkan akreditasi terkait dengan kerja pendidik yang berkesinambungan dengan kurikulum merdeka. Penyusunan jadwal cukup mudah karena dibagi per minggu berbeda dengan kurikulum 2013 yang harus rinci per hari dan minggu efektif. Walaupun terbilang mudah dalam penyusunan jadwalnya namun harus tetap meangplikasikan P5 yang bertujuan menyatukan keilmuan dengan menuangkan ke dalam proyek dengan opsi per akhir pelajaran, per minggu atau setiap semester. Mata pelajaran dalam kurikulum merdeka menggabungkan ilmu pengetahuan alam dan sosial, kemudian seni dijadikan mata pelajaran keterampilan (Ummi Inayati, 2022).

KESIMPULAN

Kurikulum selalu mengalami perubahan dalam setiap masa dikarenakan melihat bagaimana problematika yang dihadapi saat itu sehingga harus dikembangkan agar dapat menyesuaikan kebutuhan pendidikan tujuan yang diharapkan oleh pendidikan secara maksimal dalam proses pembelajaran. Kurikulum di Indonesia terbagi menjadi empat periode yaitu masa pra kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi saat ini. Dalam setiap masa terjadi perubahan secara berkala seperti masa pra kemerdekaan belum masih terpengaruh oleh kolonialisme, masa orde lama terbagi menjadi kurikulum 1947, kurikulum 1942 dan kurikulum 1964, kemudian masa orde baru terbagi menjadi kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 dan kurikulum 1994, selanjutnya masa reformasi terbagi menjadi kurikulum 2004 (KBK), kurikulum 2006 (KTSP), kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka yang di dalam penerapannya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi. (2013). *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik*. Ar-Ruzz Media.
- Alhamuddin. (2019). *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak*

- Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi (1947-2013)*. Prenadamedia.
- Andari, E. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Menggunakan Learning Management System (LMS). *Allimna: Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 1(2). <https://doi.org/10.30762/allimna.v1i2.694>
- Aslam. (2019). *Hidden Curriculum*. CV. Pena Indies.
- Baedhowi. (2007). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kebijakan dan Harapan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13(5).
- Daeng Pawero, A. M. V. (2018). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, dan K-13. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(1). <https://doi.org/10.30984/jii.v12i1.889>
- Dicky Wirianto. (2014). Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Islamic Studies*, 2(1).
- E. Mulyasa. (2009). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Fitri Wahyuni. (2015). Kurikulum dari Masa ke Masa". Vol. 10, No.2 (2015). *Jurnal Al-Adabiya*, 10(2).
- Hari Suderajat. (2004). *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)*. CV. Cipta Cekas Grafika.
- Herman Zaini. (2015). Karakteristik Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. *Jurnal Idaroh*, 1(1).
- Imam Machali. (2014). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).
- Iramdan & Manurung Lengsi. (2019). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(2).
- Ismail dan Abdul Mukti. (2000). *Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani*. Pustaka Pelajar.
- Lismina. (2019). *Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Tim Uwais Inspirasi Indonesia.
- M. Ali Hasan dan Mukti Ali. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Ma'as Shobirin. (2016). *Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar*. Deepublish.
- Muh. Asri. (2017). Dinamika Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2).
- Muhammad Nurhalim. (2011). Analisis Perkembangan Kurikulum di Indonesia (Sebuah Tinjauan Desain dan Pendekatan). *Jurnal INSANIA*, 16(3).
- S. Nasution. (1996). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996. Citra Aditya Bakti.
- Ummi Inayati. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Abad-21 di SD/MI. *Jurnal ICIE*, 2(1).
- Wina Sanjaya. (2018). *Kurikulum dan Pembelajaran : Teori dan Praktik Pengembangan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Prenadamedia Group.
- Zainal Arifin. (2011). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Remaja Rosdakarya.